



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN EVALUASI INTERN PADA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan independensi dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan Evaluasi Intern melalui Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas;

b. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaah sejawat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Evaluasi Intern pada Inspektorat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN  
EVALUASI INTERN PADA INSPEKTORAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
5. Inspektorat Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Inspektur/Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Balangan.
7. APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan fungsi melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi Pemerintah Daerah, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Audit/pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk mengontrol dan memastikan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien, sehingga akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi Intern adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja.
12. Konsultasi adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan mitra kerja, yang sifat dan ruang lingkup kegiatannya disepakati dengan mitra dan bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan tugas organisasi, manajemen organisasi, dan proses pengendalian tanpa menjadikannya menjadi tanggung jawab auditor.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Penanggungjawab kegiatan adalah pihak/orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan APIP yaitu Inspektur.

15. Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas adalah suatu penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh aspek kegiatan audit dan konsultasi pada pelaksanaan pengawasan intern.
16. Telaah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
17. Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
18. Penelaah adalah Pihak yang ditunjuk untuk melakukan Telaah sejawat terhadap Pihak yang lain.
19. Obyek yang ditelaah adalah Pihak yang ditunjuk untuk dilakukan Telaah sejawat oleh Pihak yang lain.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi APIP :

- a. untuk menyamakan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat untuk mendapatkan hasil audit yang bermutu dan berkualitas; dan
- b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi intern pada Inspektorat.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas, agar pelaksanaan Evaluasi Intern pada Inspektorat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II EVALUASI INTERN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan evaluasi intern dilakukan melalui telaah sejawat.
- (2) Telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu program pengembangan dan penjaminan kualitas bagi APIP.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menilai tata kelola Inspektorat sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;

- b. menilai tingkat kecukupan efektivitas pelaksanaan dan kelengkapan data dukung pada Program/Kegiatan pada Inspektorat;
  - c. memberikan keyakinan kepada Inspektur bahwa Program/Kegiatan pada Inspektorat telah cukup memadai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Inspektur berkaitan dengan perbaikan intern pada Inspektorat di masa yang akan datang.
- (2) Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. asas kepastian hukum/ketentuan, yaitu asas yang mengutamakan pelaksanaan tugas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan;
  - b. asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara di lingkup Inspektorat;
  - c. asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
  - d. asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
  - e. asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
  - f. asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
  - g. asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap Kegiatan dan hasil akhir dari Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan,
- (3) Penilaian tingkat kecukupan efektivitas pelaksanaan dan kelengkapan data dukung pada Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tepat waktu, yaitu setiap Program/Kegiatan harus dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan sesuai batas waktu 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. tepat mutu, yaitu pelaksanaan Program/Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan;
  - c. tepat administrasi, yaitu setiap Program/Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - d. tepat sasaran, yaitu Program/Kegiatan harus dilaksanakan dan diarahkan kepada objek yang telah ditetapkan sesuai perencanaan; dan
  - e. tepat manfaat, yaitu Program/Kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada sasaran yang ditentukan.

- (4) Pedoman pelaksanaan Evaluasi Intern pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 13 Desember 2022

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 13 Desember 2022

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**

ttd

H. SUTIKNO

**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 102

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 102 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN  
 PADA INSPEKTORAT.

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN  
 PADA INSPEKTORAT

BAB I

A. Latar Belakang.

Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan merupakan Program Penjaminan dan Pengembangan Mutu hasil pengawasan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi Intern atas hasil pengawasan dilakukan melalui Telaah sejawat antar Inspektur pembantu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan namun tidak boleh dilakukan secara resiprokal (saling menelaah) guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi Penelaah dan yang ditelaah. Telaah sejawat dilaksanakan setiap tahun oleh tim independen dan berkualitas atau berkompeten. Dalam rangka mempertahankan independensi maka telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal (saling telaah) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

APIP perlu melakukan telaah sejawat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. menjadi benchmarking bagi APIP lainnya. Sebagai bukti bahwa APIP mengikuti praktik terbaik yang berkembang secara internasional;
2. mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku;
3. menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan standar AAIFI;
4. sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP.

Telaah sejawat dimaksudkan untuk:

1. melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi;
2. menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit;
3. memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

B. Maksud dan Tujuan.

Pedoman ini dimaksudkan menjadi acuan bagi Tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap Tim Yang Ditelaah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah

sejawat.

Persyaratan agar telaah sejawat dapat dilakukan secara efektif dan efisien:

1. Adanya tim internal yang memahami konsep penilaian mutu penugasan dan didedikasikan untuk melakukan penilaian mutu internal, tim yang melakukan reviu berjenjang, dan tim yang mempersiapkan semua informasi yang diperlukan oleh Tim Penelaah;
2. Adanya penggunaan alat bantu teknologi dalam penyusunan kertas kerja;
3. Adanya dukungan dari Pimpinan Instansi.

#### C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Telaah Sejawat adalah kesesuaian dengan Standar dengan elemen-elemen kunci berikut ini:

1. Pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan;
2. Pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.

Disamping itu, maka ruang lingkup dapat ditambahkan dengan ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup disepakati antara Tim Penelaah dengan Tim yang ditelaah.

#### D. Skala Penilaian.

Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian prosentase pemenuhannya.

Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata prosentase dari tiap pertanyaan rinci. Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam lima simpulan. Simpulan hasil telaah sejawat mengacu pada Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor : KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Nilai akhir keseluruhan menunjukkan tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori simpulan, sebagai berikut :

No.	KATEGORI SIMPULAN	NILAI TINGKAT KESESUAIAN	INTERPRETASI
1.	Sangat Baik	90% - 100%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Tim Yang Ditelaah telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. Tim Yang Ditelaah telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam

			<p>organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.</p> <p>Simpulan “sangat baik” masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor.</p>
2.	Baik	80% - 89,99%	<p>Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Tim Yang Ditelaah telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. Tim Yang Ditelaah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.</p> <p>Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.</p>
3.	Cukup	65% - 79,99%	<p>Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasann intern APIP.</p> <p>Simpulan “Cukup” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga</p>

			perlu menjadi concern manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi
4.	Kurang	55% - 64,99%	Tim Yang Ditelaah telah merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Namun demikian, rancangan dan implementasi APIP tersebut masih perlu cukup banyak perbaikan /penyempurnaan. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi concern manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi
5.	Sangat Kurang	<54,99%	Tim Yang Ditelaah belum merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu perbaikan yang cukup signifikan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi concern manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi

## BAB II PERSIAPAN TELAHAH SEJAWAT

### A. Persiapan Tim yang ditelaah.

Persiapan yang perlu dilakukan Tim yang ditelaah sebelum dilaksanakannya Telaah Sejawat:

1. memahami Standar dan mempersiapkan proses penilaian telaah sejawat.
2. memahami pedoman penilaian telaah sejawat.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan telaah sejawat.
4. melakukan penilaian internal secara berkala sebagaimana disyaratkan dalam Standar penjaminan mutu
5. memberitahu para Auditor jadwal pelaksanaan telaah sejawat agar mereka siap bila diperlukan mengisi kuesioner atau untuk diwawancarai.
6. menjelaskan kepada Tim Penelaah tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional Tim Yang Ditelaah.
7. mereviu kertas kerja dan laporan hasil audit sebelum diserahkan kepada Tim Penelaah.

### B. Persiapan Tim Penelaah.

#### 1. Pembentukan Tim Penelaah

Penetapan Tim Penelaah dilakukan melalui Surat Tugas Inspektur Kabupaten Balangan.

Tim terdiri dari pejabat APIP dan auditor dengan persyaratan:

- a. penanggungjawab adalah pimpinan tertinggi APIP Penelaah;
- b. pengendali Mutu adalah pejabat setingkat lebih rendah dibawah pimpinan tertinggi APIP Penelaah yang memiliki pemahaman tentang kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar mutu yang ditetapkan;
- c. pengendali Teknis adalah Penelaah yang memiliki kemampuan untuk mensupervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- d. ketua Tim adalah Penelaah yang memiliki pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIP dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal;
- e. anggota Tim adalah auditor dan pejabat APIP yang mempunyai pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIP dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal;
- f. memiliki kemampuan komunikasi;
- g. memiliki pemahaman yang cukup dan berinteraksi dengan orang lain, tentang proses bisnis APIP yang akan memiliki kemampuan analisis dan mampu memberikan saran yang konstruktif untuk perbaikan aktivitas audit intern.

Jumlah personil dalam Tim dipengaruhi oleh ruang lingkup telaah sejawat, sasaran, dan struktur organisasi internal audit yang akan direviu. Secara umum minimal Tim terdiri dari: Penanggungjawab, Wakil Penanggungjawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan 2 (dua) orang Anggota Tim.

### BAB III PEKERJAAN LAPANGAN

Pekerjaan lapangan meliputi penilaian terhadap penugasan penjaminan (*assurance*) dan penugasan konsultasi yang dilakukan Tim yang ditelaah. Penilaian dilakukan terhadap laporan audit, kertas kerja induk dan kertas kerja pendukung, kebijakan dan prosedur audit, kompetensi. Auditor yang merupakan gabungan antara pengetahuan dan ketrampilan, termasuk penggunaan teknologi informasi, penilaian risiko, pemantauan pengendalian, interaksi dengan manajemen, kinerja baik atau keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, dan bukti adanya perbaikan yang terus-menerus. Pekerjaan lapangan diawali dengan pertemuan awal Tim Penelaah dengan Tim yang ditelaah dan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dilaksanakan maka diakhiri dengan pertemuan akhir. Pekerjaan lapangan dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

#### A. Perencanaan Pekerjaan Lapangan.

Berdasarkan informasi yang didapat dari kuesioner, maka dapat direncanakan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Penelaah untuk memenuhi tujuan penugasan. Tim melakukan penilaian terhadap aktivitas audit internal.

#### B. Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan.

Pelaksanaan pekerjaan lapangan dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan pengawasan dengan standarnya serta dituangkan dalam kertas kerja dengan contoh format sebagai berikut :

##### 1) Audit Ketaatan



### PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN INSPEKTORAT

#### KERTAS KERJA TELAHAH SEJAWAT INTERNAL

Penelaah	:	Inspektur Pembantu .....
Yang Ditelaah	:	Inspektur Pembantu .....
Objek Telaah		
Jenis Pengawasan	:	Audit.....
Auditi	:	
Pelaksanaan Tugas	:	..... s.d. ....
No Surat Tugas	:	
Tanggal Surat Tugas	:	

Susunan Tim	
Penanggungjawab	:
Wk. Penanggungjawab	:
Pengendali Teknis :	
Ketua Tim	:
Anggota	: 1.
	2.
	3.

Tujuan	:	1. Untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan
		2. Untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.
<b>KESIMPULAN :</b>		
<b>NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>	
89,99	<b>BAIK</b>	

## HASIL TELAAH :

No	Uraian	Skor	Ada / Tidak ada	Catatan/Kekurangan
1	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAKSANAAN PENGAWASAN			
1	Kartu Penugasan (KM 06)			
2	Alokasi Anggaran Waktu dan Realisasi Audit (KM 07)			
	Program Kerja Audit (KM 08)			
3	PKA Survey Pendahuluan			
4	PKA Sistem Pengendalian			
5	PKA Audit Rinci			
6	Chek List Penyelesaian Penugasan (KM 09)			
7	Notulensi Kesepakatan (KM 10)			
8	Lembar Reviu Supervisi (KM 11)			
9	Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (KM 12)			

10	Pengendalian Penyusunan Laporan (KM 13)			
11	Reviu Konsep Laporan (KM 14)			
12	Surat Penyampaian Laporan (KM 15)			
13	Lembar Reviu			
	<b>Kertas Kerja :</b>			
14	Kertas Kerja Survey Pendahuluan			
15	Kertas Kerja Sistem Pengendalian			
16	Kertas Kerja Audit Rinci			
17	Surat Pernyataan Independensi			
18	Kuesioner Kepuasan Pemangku Kepentingan			
II	<b>PELAPORAN HASIL PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAPORAN</b>			
	Audit Ketaatan			
19	Surat Pengantar			
20	Bagian Pertama			
21	A. Ringkasan Hasil Audit			
22	B. Rekomendasi			
	<b>Bagian Kedua</b>			
23	<b>BAB I INFORMASI UMUM</b>			
24	1. Dasar Audit			
25	2. Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab			
26	3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit			
27	4. Informasi Auditi			
28	5. Penilaian atas Struktur Pengendalian Intern			
29	<b>BAB II HASIL AUDIT</b>			
30	1. Penilaian atas Ketaatan terhadap Ketentuan			
31	2. Kesesuaian Output dengan Tujuan Program			
32	3. Temuan Hasil Audit			
33	4. Hal-hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan			
34	5. Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya			
35	<b>BAB III PENUTUP</b>			

	Jumlah Skor Perencanaan dan Pelaksanaan			
	Jumlah Skor Pelaporan			
	Jumlah Skor			
	Bobot			
	Nilai			

Kriteria nilai yang diberikan pada kolom nilai adalah :

- 10 = Bila telah lengkap
- 5 = Bila Belum lengkap
- 0 = Jika Tidak dibuat
-  = Tidak perlu dinilai

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil telaah atas berkas dokumen yang ada, disimpulkan sebagai berikut :

Demikian untuk menjadi maklum sebagai bahan selanjutnya.

Pengendali Teknis

Ketua Tim Telaah

.....

...  
NIP.

.....

.....

NIP. ....

Mengetahui/Menyet  
ujui  
Ketua Tim Yang  
Ditelaah

.....

...  
NIP. ....

## 2) Audit Kinerja



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
INSPEKTORAT**

**KERTAS KERJA TELAHAH SEJAWAT INTERNAL**

Penelaah	:	Inspektur Pembantu .....
Yang Ditelaah	:	Inspektur Pembantu .....
Objek Telaah		
Jenis Pengawasan	:	Audit.....
Auditi	:	
Pelaksanaan Tugas	:	..... s.d. ....
No Surat Tugas	:	
Tanggal Surat Tugas	:	
Susunan Tim		
Penanggungjawab	:	
Wk. Penanggungjawab	:	
Pengendali Teknis :		
Ketua Tim	:	
Anggota	:	1.
		2.
		3.

Tujuan	:	1. Untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan
		2. Untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.

<b>KESIMPULAN :</b>	
<b>NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
89,99	BAIK

## HASIL TELAAH :

No	Uraian	Skor	Ada / Tidak ada	Catatan/Kekurangan
1	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAKSANAAN PENGAWASAN			
1	Kartu Penugasan (KM 06)			
2	Alokasi Anggaran Waktu dan Realisasi Audit (KM 07)			
	Program Kerja Audit (KM 08)			
3	PKA Survey Pendahuluan			
4	PKA Sistem Pengendalian			
5	PKA Audit Rinci			
6	Chek List Penyelesaian Penugasan (KM 09)			
7	Notulensi Kesepakatan (KM 10)			
8	Lembar Reviu Supervisi (KM 11)			
9	Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (KM 12)			
10	Pengendalian Penyusunan Laporan (KM 13)			
11	Reviu Konsep Laporan (KM 14)			
12	Surat Penyampaian Laporan (KM 15)			
13	Lembar Reviu			
	Kertas Kerja :			
14	Kertas Kerja Survey Pendahuluan			
15	Kertas Kerja Sistem Pengendalian			
16	Kertas Kerja Audit Rinci			
17	Surat Pernyataan Independensi			

18	Kuesioner Kepuasan Pemangku Kepentingan			
II	PELAPORAN HASIL PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAPORAN			
	Audit Kinerja			
19	Surat Pengantar	10		
20	Bab I : Pendahuluan	10		
21	A. Dasar Penugasan	10		
22	B. Tujuan Audit	10		
23	C. Tujuan dan Ruang Lingkup	10		
24	D. Metodologi Audit Kinerja	10		
25	E. Penilaian Kinerja	10		
26	F. Gambaran Umum Program Prioritas	10		
27	G. Periode dan Waktu Pelaksanaan	10		
28	BAB II Hasil Audit Kinerja	10		
29	A. Mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E dan menilai serta menganalisis capaian kinerja	10		
30	B. Identifikasi penyebab tidak optimalnya capaian kinerja dengan identifikasi dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian	10		
31	BAB III Simpulan dan Rekomendasi Hasil Audit	10		
32	A. Simpulan	10		
33	B. Rekomendasi	10		

34	BAB IV PENUTUP	10		
	Jumlah Skor Perencanaan dan Pelaksanaan			
	Jumlah Skor Pelaporan			
	Jumlah Skor			
	Bobot			
	Nilai			

Kriteria nilai yang diberikan pada kolom nilai adalah :

- 10 = Bila telah lengkap
- 5 = Bila Belum lengkap
- 0 = Jika Tidak dibuat
-  = Tidak perlu dinilai

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil telaah atas berkas dokumen yang ada, disimpulkan sebagai berikut :.....

Demikian untuk menjadi maklum sebagai bahan selanjutnya.

Pengendali Teknis

Ketua Tim Telaah

.....

...  
NIP.

.....

.....

NIP. ....

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua Tim Yang  
Ditelaah

.....

...  
NIP. ....

## 3) Pengawasan Lainnya

Untuk kegiatan pengawasan lainnya apabila akan dilakukan telaah sejawat internal, maka kertas kerjanya dapat menyesuaikan dengan kertas kerja telaah sejawat internal untuk audit ketaatan dan audit kinerja.

Revisi kertas kerja telaah sejawat internal dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan standar auditnya dengan kesepakatan seluruh tim penelaah dengan tim yang ditelaah.

## C. Pelaporan

Pada tahap akhir pelaksanaan telaah sejawat internal, Penelaah menyampaikan hasil telaahan kepada pimpinan APIP berupa Nota Dinas Laporan Telaah dengan tembusan kepada Inspektur Pembantu yang ditelaah. Kertas kerja telaah sejawat internal setelah mendapat persetujuan dari Tim yang ditelaah, maka diwajibkan untuk menyusun laporan. Contoh laporan telaah sejawat internal seperti berikut :



## PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN INSPEKTORAT

Jln. Jenderal A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Batu Piring Telp. (0526)  
2028395,

Fax. (0526) 2028248 Paringin Selatan Kode Pos 71662

---

### NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Inspektur Kabupaten Balangan  
 Dari : Inspektur Pembantu .....

Nomor : Nota Dinas  
 Tanggal : ..... 20xx

Tembusan : Inspektur Pembantu (*yang ditelaah*)  
 Perihal : Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal Yang Dilakukan  
 kepada Tim  
 Yang di Inspektur Pembantu .....

---

### ISI

Dalam rangka peningkatan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Balangan, kami telah melakukan kegiatan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan yang berpedoman pada Peraturan Bupati Balangan Nomor .... Tahun 2022 tentang.

Adapun tujuan dilaksanakannya telaahan sejawat tersebut untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan serta untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.

Telaahan sejawat internal telah dilakukan mulai tanggal s.d. tanggal ..... terhadap tim dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pengawasan	:	Audit.....
Auditi	:	
Pelaksanaan Tugas	:	..... s.d. ....
No Surat Tugas	:	
Tanggal Surat Tugas	:	
Susunan Tim		
Penanggungjawab	:	
Wk. Penanggungjawab	:	
Pengendali Teknis	:	
Ketua Tim	:	
Anggota	:	1.
		2
		3

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa objek tim yang ditelaah memperoleh nilai sebesar dengan

kategori Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang/Sangat Kurang. Nilai tersebut diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengawasan Telah Sesuai Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan.

Objek yang ditelaah pada bagian ini memperoleh skor sebesar , skor tersebut diperoleh dengan simpulan bahwa pada umumnya standar telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

[uraikan kekurangannya]

2. Pelaporan Hasil Pengawasan Telah Sesuai Dengan Standar Pelaporan

Objek yang ditelaah pada bagian ini memperoleh skor sebesar .... , skor tersebut diperoleh dengan simpulan bahwa pada umumnya pada umum standar telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

(uraikan kekurangannya)

Berdasarkan hal tersebut diatas, disarankan kepada Tim yang ditelaah agar segera untuk melakukan perbaikan berupa :

1. ....
2. ....

Kami sampaikan penghargaan kepada Tim yang ditelaah atas kerjasamanya dalam kegiatan telaahan sejawat internal dalam rangka Evaluasi Internal dalam rangka peningkatan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Inspektur Pembantu ....  
Selaku Tim Penelaah

.....  
NIP. ....

D. Tindak Lanjut

Tim Yang Ditelaah mengirimkan tindak lanjut sesuai dengan saran penelaah kepada Pimpinan APIP dengan tembusan ke Tim Penelaah.



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**